

Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dan Pengaruhnya terhadap Etos Kerja Guru Madrasah di Kabupaten Tuban

Fadhilah Wakhidah¹, Sri Minarti²

^{1,2}Program Studi PAI, Fakultas Tarbiyah, Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro

fdhlhwkhdh.20@gmail.com, minarti@sunan-giri.ac.id

Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Keywords:

policy implementation, teacher certification, teacher work ethic, teacher professionalism, madrasah education.

ABSTRACT

This study aims to determine the implementation of the teacher certification policy in Tuban Regency and its impact on the work ethic of madrasah teachers. This study used a descriptive qualitative approach with field research. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation involving madrasah teachers, madrasah principals, and relevant parties within the Ministry of Religious Affairs of Tuban Regency. The results indicate that the implementation of the teacher certification policy in Tuban Regency has essentially been carried out in accordance with government regulations through administrative stages, Teacher Professional Education (PPG), and the issuance of teacher certificates. Teacher certification has significantly improved teacher work ethic, particularly in aspects of discipline, work responsibility, professionalism, and teaching motivation. Certified teachers tend to be more active in preparing learning materials, participating in competency development activities, and carrying out teaching tasks more regularly. However, the results also indicate that improvements in teacher work ethic have not been evenly distributed. Some teachers still view certification as a means to obtain professional allowances, thus, improving the quality of learning has not been fully optimized. Furthermore, factors such as the work environment, leadership of madrasah principals, and the supervisory system also influence the success of teacher certification implementation. Thus, the implementation of the teacher certification policy in Tuban Regency can be said to have made a positive contribution to improving the work ethic of madrasah teachers, although ongoing monitoring and evaluation are still required to optimally achieve the goal of improving educational quality.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Article Info

Article history:

Received April 25, 2026

Revised May 18, 2026

Accepted May 26, 2026

Kata kunci:

implementasi kebijakan, sertifikasi guru, etos kerja guru, profesionalisme guru, pendidikan madrasah.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban serta pengaruhnya terhadap etos kerja guru madrasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan melibatkan guru madrasah, kepala madrasah, serta pihak terkait di lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui tahapan administrasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), dan penerbitan sertifikat pendidik. Sertifikasi guru memberikan pengaruh terhadap peningkatan etos kerja guru, khususnya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab kerja, profesionalisme, dan motivasi mengajar. Guru yang telah tersertifikasi

cenderung lebih aktif dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dan menjalankan tugas pembelajaran secara lebih teratur. Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan etos kerja guru belum terjadi secara merata. Sebagian guru masih memandang sertifikasi sebagai sarana memperoleh tunjangan profesi sehingga peningkatan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Selain itu, faktor lingkungan kerja, kepemimpinan kepala madrasah, dan sistem pengawasan juga memengaruhi keberhasilan implementasi sertifikasi guru. Dengan demikian, implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban dapat dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan etos kerja guru madrasah, meskipun masih memerlukan pengawasan dan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara optimal.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



Corresponding Author:

Fadhilah Wakhidah
Universitas Nahdlatul Ulama' Sunan Giri Bojonegoro
Email: fdhllwkhdh.20@gmail.com

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan salah satu aspek penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, guru memiliki peran yang sangat penting karena guru menjadi pelaksana utama dalam proses pembelajaran. Oleh sebab itu, pemerintah terus melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, salah satunya melalui program sertifikasi guru. Sertifikasi guru merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, serta kesejahteraan guru. Melalui program sertifikasi, guru diharapkan mampu meningkatkan kualitas pembelajaran dan menjalankan tugas pendidikan secara lebih profesional. Selain itu, adanya tunjangan profesi juga diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan etos kerja guru dalam melaksanakan tugas mengajar.

Dalam pelaksanaannya, kebijakan sertifikasi guru tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral dan profesional guru sebagai tenaga pendidik. Guru yang telah tersertifikasi diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kedisiplinan, tanggung jawab kerja, kreativitas pembelajaran, dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan. Namun demikian, berdasarkan kondisi yang ditemukan di lapangan, implementasi sertifikasi guru belum sepenuhnya menunjukkan hasil yang sama pada setiap guru. Sebagian guru mengalami peningkatan profesionalisme dan etos kerja setelah memperoleh sertifikasi, tetapi terdapat pula guru yang belum menunjukkan perubahan yang signifikan dalam pelaksanaan tugas pembelajaran. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan sertifikasi guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor tunjangan profesi, tetapi juga dipengaruhi oleh kesadaran pribadi, lingkungan kerja, kepemimpinan kepala madrasah, dan sistem pengawasan pendidikan.

Kabupaten Tuban merupakan salah satu daerah yang melaksanakan program sertifikasi guru madrasah melalui koordinasi dengan Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Berdasarkan

hasil observasi awal yang peneliti lakukan, pelaksanaan sertifikasi guru di beberapa madrasah di Kabupaten Tuban menunjukkan adanya pengaruh terhadap peningkatan etos kerja guru, khususnya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab kerja, dan profesionalisme mengajar. Akan tetapi, dalam implementasinya masih ditemukan beberapa kendala, seperti administrasi sertifikasi, pemerataan program, dan belum optimalnya pengawasan pasca sertifikasi.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru di Kabupaten Tuban”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan sertifikasi guru, pengaruhnya terhadap etos kerja guru madrasah, serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Penelitian dilakukan di beberapa madrasah di Kabupaten Tuban dengan pengambilan data melalui pihak madrasah dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui implementasi kebijakan sertifikasi guru serta pengaruhnya terhadap etos kerja guru madrasah.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung melalui observasi dan wawancara dengan guru madrasah, kepala madrasah, serta pihak terkait pelaksanaan sertifikasi guru. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen, jurnal, buku, serta peraturan yang berkaitan dengan kebijakan sertifikasi guru.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk melihat kondisi pelaksanaan sertifikasi dan etos kerja guru di madrasah. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi secara mendalam mengenai pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban. Sedangkan dokumentasi digunakan sebagai data pendukung penelitian berupa arsip, data guru tersertifikasi, dan dokumen terkait lainnya.

Teknik analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Untuk menjaga keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik dengan membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang diperoleh selama penelitian berlangsung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Program Sertifikasi Guru

Pelaksanaan program sertifikasi guru di Kabupaten Tuban merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui penguatan profesionalisme tenaga pendidik di lingkungan madrasah. Kebijakan tersebut tidak hanya dimaknai sebagai bentuk legalitas profesi guru, melainkan juga sebagai instrumen strategis untuk membangun kualitas pembelajaran yang lebih efektif, terarah, dan berorientasi pada peningkatan kompetensi peserta didik. Implementasi sertifikasi guru dilaksanakan melalui koordinasi antara Kementerian Agama Kabupaten Tuban, pihak madrasah, dan lembaga penyelenggara Pendidikan Profesi Guru (PPG). Dalam pelaksanaannya, guru yang mengikuti program sertifikasi diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan administratif dan akademik, seperti kualifikasi pendidikan

minimal sarjana, kepemilikan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK), kesesuaian bidang ajar, serta aktif menjalankan tugas pembelajaran di madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan sertifikasi di Kabupaten Tuban telah berjalan sesuai mekanisme yang ditetapkan pemerintah. Program tersebut memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kesadaran profesional guru dalam menjalankan tugas pendidikan. Guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik cenderung menunjukkan sikap kerja yang lebih disiplin, bertanggung jawab, dan aktif dalam mengembangkan kompetensi pedagogiknya. Peningkatan etos kerja guru tampak dari keterlibatan yang lebih intensif dalam kegiatan pengembangan profesi, seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), seminar pendidikan, pelatihan pembelajaran, serta penyusunan perangkat ajar yang lebih sistematis. Kondisi ini menunjukkan bahwa sertifikasi tidak hanya berdampak pada aspek administratif, tetapi juga mendorong perubahan pola kerja guru menuju profesionalisme yang lebih baik.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurul Adinda Lubis dkk. yang menjelaskan bahwa implementasi sertifikasi guru mampu meningkatkan kedisiplinan, tanggung jawab profesional, dan kualitas pelaksanaan pembelajaran guru madrasah. Selain itu, penelitian Suheri dkk. juga menegaskan bahwa sertifikasi memiliki hubungan positif terhadap motivasi kerja dan kinerja guru karena adanya pengakuan profesional dan peningkatan kesejahteraan melalui tunjangan profesi. Meskipun demikian, implementasi kebijakan sertifikasi di lingkungan madrasah masih menghadapi beberapa tantangan. Sebagian guru masih memandang sertifikasi sebatas sarana memperoleh tunjangan profesi sehingga orientasi peningkatan kualitas pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Di samping itu, pengawasan dan evaluasi pasca sertifikasi dinilai masih perlu diperkuat agar peningkatan kompetensi guru dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan demikian, pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban dapat dikatakan telah memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan etos kerja guru madrasah. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tersebut tetap memerlukan dukungan pembinaan, supervisi akademik, dan evaluasi yang konsisten agar tujuan peningkatan mutu pendidikan benar-benar dapat tercapai secara optimal.

2. Proses dan Mekanisme Sertifikasi Guru : Di Kabupaten Tuban

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, proses dan mekanisme sertifikasi guru di Kabupaten Tuban dilaksanakan melalui beberapa tahapan yang telah ditetapkan pemerintah. Tahapan awal dimulai dari pendataan dan verifikasi administrasi guru oleh pihak madrasah dan Kementerian Agama Kabupaten Tuban. Verifikasi tersebut meliputi kualifikasi akademik, masa kerja, kesesuaian bidang ajar, dan beban mengajar guru. Guru yang telah memenuhi persyaratan administrasi kemudian mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagai bagian utama dalam proses sertifikasi. Dalam pelaksanaan PPG, guru memperoleh pembekalan terkait kompetensi pedagogik, profesional, sosial, dan kepribadian sebagai standar utama guru profesional.

Berdasarkan hasil observasi peneliti, proses sertifikasi tidak hanya menekankan pada kelengkapan administrasi, tetapi juga kemampuan guru dalam melaksanakan pembelajaran. Hal tersebut terlihat dari adanya praktik mengajar, penyusunan perangkat pembelajaran, serta uji kompetensi yang harus diikuti guru sebelum memperoleh sertifikat pendidik. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa mekanisme sertifikasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan profesionalisme dan etos kerja guru madrasah. Guru yang telah tersertifikasi terlihat lebih siap dalam melaksanakan pembelajaran, lebih disiplin dalam menjalankan tugas, dan lebih aktif mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi.

Selain itu, kepala madrasah juga memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan sertifikasi guru melalui supervisi akademik dan evaluasi kinerja guru. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, pengawasan tersebut bertujuan agar guru yang telah memperoleh sertifikat pendidik mampu menunjukkan peningkatan kualitas kerja dan tanggung jawab profesional secara nyata di lingkungan madrasah. Dapat disimpulkan bahwa proses dan mekanisme sertifikasi guru di Kabupaten Tuban telah memberikan kontribusi terhadap peningkatan etos kerja guru madrasah. Akan tetapi, efektivitas kebijakan tersebut tetap memerlukan dukungan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar dampaknya terhadap mutu pendidikan dapat lebih optimal.

3. Pengaruh Sertifikasi terhadap Etos Kerja Guru

a. Kedisiplinan Guru

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, sertifikasi guru memberikan pengaruh terhadap meningkatnya kedisiplinan guru madrasah di Kabupaten Tuban. Guru yang telah tersertifikasi cenderung lebih tepat waktu dalam kehadiran, lebih tertib dalam administrasi pembelajaran, dan lebih konsisten dalam menjalankan tugas mengajar. Hasil wawancara yang peneliti lakukan menunjukkan bahwa guru merasa memiliki tanggung jawab profesional yang lebih besar setelah memperoleh sertifikat pendidik. Kondisi tersebut mendorong guru untuk menjaga kualitas kerja dan kedisiplinan dalam kegiatan pembelajaran di madrasah.

b. Tanggung Jawab Kerja

Berdasarkan hasil observasi peneliti, guru yang telah tersertifikasi menunjukkan tanggung jawab kerja yang lebih baik dibanding sebelumnya. Hal tersebut terlihat dari kesiapan guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, melaksanakan evaluasi belajar, serta aktif mengikuti kegiatan sekolah dan pengembangan profesi. Guru juga lebih aktif dalam meningkatkan kualitas pembelajaran karena adanya tuntutan profesionalisme sebagai guru yang telah memperoleh pengakuan melalui sertifikasi.

c. Profesionalisme Guru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan pengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru madrasah di Kabupaten Tuban. Guru yang telah tersertifikasi terlihat lebih aktif mengikuti seminar, pelatihan, MGMP, dan kegiatan pengembangan kompetensi lainnya. Selain itu, guru juga lebih memahami pentingnya penggunaan metode pembelajaran yang bervariasi agar proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak monoton.

d. Motivasi Mengajar

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan, sertifikasi guru memberikan motivasi tersendiri bagi guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran. Selain karena adanya tunjangan profesi, guru juga merasa lebih dihargai secara profesional sehingga semangat kerja dalam mengajar menjadi meningkat. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa

motivasi kerja guru tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, tetapi juga lingkungan kerja, dukungan kepala madrasah, dan kesadaran pribadi guru terhadap tanggung jawab profesinya.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat

a. Dukungan Pemerintah

Berdasarkan hasil penelitian, dukungan pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban. Dukungan tersebut terlihat melalui pelaksanaan program sertifikasi, pemberian tunjangan profesi, pelatihan guru, serta supervisi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Agama. Meskipun demikian, beberapa guru menyampaikan bahwa informasi terkait administrasi sertifikasi dan perubahan sistem pendataan terkadang masih kurang jelas sehingga menimbulkan kebingungan dalam proses pengurusan sertifikasi.

b. Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana pembelajaran turut mendukung peningkatan profesionalisme guru di madrasah. Madrasah yang memiliki fasilitas pembelajaran memadai cenderung lebih mudah dalam mendukung guru untuk mengembangkan metode pembelajaran yang lebih variatif. Namun berdasarkan hasil observasi peneliti, tidak seluruh madrasah memiliki fasilitas yang sama. Beberapa madrasah masih mengalami keterbatasan media pembelajaran dan sarana pendukung sehingga memengaruhi efektivitas pembelajaran yang dilakukan guru.

c. Kendala Administrasi

Dalam pelaksanaan sertifikasi, kendala administrasi masih menjadi hambatan yang cukup sering ditemukan. Berdasarkan hasil wawancara, beberapa guru mengalami kesulitan dalam proses pemberkasan, perubahan sistem administrasi, serta penyesuaian data yang harus dilakukan secara berkala. Selain itu, proses administrasi yang cukup panjang terkadang membuat guru merasa terbebani karena harus membagi waktu antara tugas mengajar dan pengurusan dokumen sertifikasi.

d. Tantangan Implementasi

Berdasarkan hasil penelitian, tantangan utama dalam implementasi sertifikasi guru adalah belum meratanya perubahan pola kerja guru setelah memperoleh sertifikat pendidik. Sebagian guru menunjukkan peningkatan profesionalisme dan etos kerja, namun sebagian lainnya belum mengalami perubahan yang signifikan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sertifikasi guru belum sepenuhnya dapat dijadikan satu-satunya indikator peningkatan kualitas guru. Faktor kesadaran pribadi, budaya kerja madrasah, kepemimpinan kepala madrasah, dan lingkungan pendidikan juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap etos kerja guru.

5. Analisis Politik dan Etika Pendidikan

a. Kebijakan Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Guru

Berdasarkan hasil penelitian, kebijakan sertifikasi guru merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik, khususnya di lingkungan madrasah. Kebijakan tersebut tidak hanya bertujuan meningkatkan kesejahteraan

guru, tetapi juga mendorong peningkatan mutu pembelajaran. Namun dalam pelaksanaannya, peneliti menemukan bahwa keberhasilan kebijakan sertifikasi masih sangat bergantung pada proses pengawasan, evaluasi, dan pembinaan yang dilakukan setelah guru memperoleh sertifikat pendidik.

b. Keadilan Sertifikasi Guru

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, sebagian guru menilai bahwa pelaksanaan sertifikasi sudah berjalan cukup baik. Akan tetapi, terdapat pula pandangan bahwa kesempatan mengikuti sertifikasi terkadang belum dirasakan merata oleh seluruh guru, terutama berkaitan dengan kuota, administrasi, dan proses pendataan. Hal tersebut menunjukkan bahwa aspek pemerataan dan transparansi dalam pelaksanaan sertifikasi masih perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kesenjangan di lingkungan pendidikan.

c. Profesionalisme dan Tanggung Jawab Moral Guru

Sertifikasi guru tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral guru sebagai tenaga pendidik. Berdasarkan hasil penelitian, guru yang telah tersertifikasi diharapkan mampu menjaga profesionalisme, menjadi teladan bagi peserta didik, dan meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Namun demikian, peneliti juga menemukan bahwa profesionalisme guru tidak dapat dibentuk hanya melalui sertifikasi semata. Kesadaran pribadi, integritas, komitmen mengajar, dan budaya kerja di lingkungan madrasah tetap menjadi faktor penting dalam membangun etos kerja guru secara menyeluruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban pada dasarnya telah berjalan sesuai dengan ketentuan pemerintah melalui Kementerian Agama. Pelaksanaan sertifikasi dilakukan melalui beberapa tahapan, mulai dari verifikasi administrasi, Pendidikan Profesi Guru (PPG), hingga penerbitan sertifikat pendidik. Dalam pelaksanaannya, program sertifikasi memberikan pengaruh terhadap peningkatan profesionalisme guru madrasah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sertifikasi guru memberikan dampak terhadap etos kerja guru, khususnya dalam aspek kedisiplinan, tanggung jawab kerja, profesionalisme, dan motivasi mengajar. Sebagian besar guru yang telah tersertifikasi terlihat lebih aktif dalam mempersiapkan perangkat pembelajaran, mengikuti kegiatan pengembangan kompetensi, dan melaksanakan tugas pembelajaran secara lebih teratur. Namun demikian, peningkatan etos kerja guru tidak terjadi secara merata pada seluruh guru yang telah tersertifikasi. Peneliti masih menemukan adanya sebagian guru yang memandang sertifikasi lebih berorientasi pada tunjangan profesi sehingga perubahan dalam kualitas pembelajaran belum sepenuhnya optimal. Selain itu, faktor lingkungan kerja, kepemimpinan kepala madrasah, kesadaran pribadi guru, dan sistem pengawasan juga memengaruhi keberhasilan implementasi sertifikasi guru.

Faktor pendukung dalam implementasi sertifikasi guru di Kabupaten Tuban meliputi dukungan pemerintah, pelaksanaan pelatihan guru, dan adanya tunjangan profesi. Sedangkan faktor penghambat meliputi kendala administrasi, keterbatasan sarana pendukung pembelajaran di beberapa madrasah, serta belum optimalnya evaluasi dan pengawasan pasca sertifikasi. Dengan demikian,

implementasi kebijakan sertifikasi guru di Kabupaten Tuban dapat dikatakan memberikan kontribusi positif terhadap peningkatan etos kerja guru madrasah, meskipun dalam pelaksanaannya masih memerlukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara berkelanjutan agar tujuan peningkatan mutu pendidikan dapat tercapai secara lebih optimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Fuadi, Kamal. "Studi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Sertifikasi Guru di Kementerian Agama." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 6, No. 2, 2018.
- Lubis, Nurul Adinda, dkk. "Implementasi Kebijakan Sertifikasi Guru dalam Meningkatkan Kinerja Guru." *Jurnal Mudabbir* Vol. 5, No. 2, 2023.
- Mulyasa, E. *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013.
- Suheri, dkk. "Pengaruh Sertifikasi Guru dan Implementasi Program MGMP terhadap Motivasi dan Kinerja Guru." *Jurnal Akuntabilitas Manajemen Pendidikan* Vol. 9, No. 2, 2021.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Wahjosumidjo. *Kepemimpinan Kepala Sekolah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Wibawa, Samodra. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- Wibowo. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.